



**SIKAP DAN PERILAKU POLITIK PENYANDANG  
DISABILITAS TUNA NETRA PADA KOMUNITAS SAHABAT  
MATA KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh  
Niken Setiasih  
3301412109

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2016**



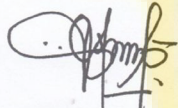
**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia  
Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada:

Hari : Jumat,

Tanggal : 9 September 2016

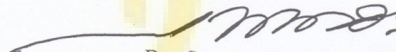
Pembimbing Skripsi I



Puji Lestari, S.Pd, M.Si

NIP. 19770715 200112 2 008

Pembimbing Skripsi II



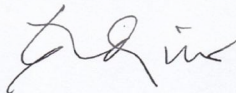
Drs. Sumarno, M.A.

NIP. 19561010 198503 1 003

**UNNES**

Mengetahui

UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan



Drs. Tijan, M.Si

NIP: 196211201987021001

**PENGESAHAN KELULUSAN**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 20 September 2016

Penguji I



Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si

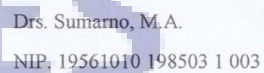
NIP. 197112042010121001

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Puji Lestari, S.Pd, M.Si  
NIP. 19770715 200112 2 008



Drs. Sumarno, M.A.  
NIP. 19561010 198503 1 003

UNNES  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



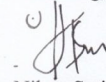
Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A.

NIP 19630802198803 1 001

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, September 2016

  
Niken Setiasih  
3301412109



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan katakanlah, ‘ Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (Thaha: 114). “ Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan tanpa batas” (Az- Zumar: 10)

“Dan kami wajibkan kepada manusia agar (berbuat) kebaikan kepada kedua orang tuanya” (An ankabut: 8).

Ya Allah jadikan dunia di tanganku, bukan di hatiku

Persembahan:

Dengan mengucapkan bismillah, skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- Bapak Muhammad Romadhon dan Ibu Woro Endro Hastuti, orang tuaku tercinta, terima kasih atas setiap iringan doa dan dukungan yang tiada henti.
- Adikku Dian Oktaviani dan Nurul Khasanah yang aku sayangi.
- Ibu Puji Lestari dan Bapak Sumarno terimakasih atas dukungan dan bimbingannya.
- Teman-teman Tuna Netra Komunitas Sahabat Mata Kecamatan Mijen Kota Semarang atas bantuan dan motivasinya.
- Teman- teman seperjuangan di Pondok Rijalul Quran, Nova, Evi, Tasbih, Ana
- Teman-teman pejuang skripsi Gisel, Suci, Hanik, Atik, Fica, Nova, Ulfah, Winda terima kasih atas motivasinya.
- Pkn 2012

## PRAKATA

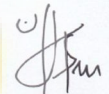
Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan Rahmat, Hidayah dan Karunianya, penulis skripsi yang berjudul “Sikap Dan Perilaku Politik Penyandang Disabilitas Tuna Netra Pada Komunitas Sahabat Mata Kecamatan Mijen Kota Semarang” dapat diselesaikan dengan lancar dan baik.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr.Fathur Rokhman, M. Hum, Rektor Universitas negeri Semarang.
2. Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Puji Lestari, S.Pd, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Drs. Sumarno, M.A., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan sabar, dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Noorochmat Isdaryanto, S.S.,M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Teman-teman komunitas Sahabat Mata, Pak Basuki, Pak Yusuf, Pak Slamet, Mbak Fifi Mas Sofyan, Mas Kartijo, Mas Kiswanto, dan Mas Yoko.
7. Bapak, Ibu, Dek Dian, Dek Sanah yang telah memberikan doa dan dukungannya tanpa henti.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih dari Allah SWT. Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Semarang, September 2016

  
Penulis.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## SARI

Setiasih, Niken. 2016. *“Sikap Dan Perilaku Politik Penyandang Disabilitas Tuna Netra Pada Komunitas Sahabat Mata Kecamatan Mijen Kota Semarang”*. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Puji Lestari, S.Pd, M.Si., dan Drs. Sumarno, M.A., 154 halaman.

### **Kata Kunci: Sikap Politik, Perilaku Politik**

Komunitas sahabat mata adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial pendidikan namun berperan juga dalam bidang politik yaitu dalam hal membantu menyebarkan isu-isu politik, kegiatan-kegiatan politik apa yang sedang terjadi kepada masyarakat melalui radio SAMA umumnya dan kepada teman-teman tuna netra di Kota Semarang pada khususnya, Bertolak dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang sikap dan perilaku politik anggota komunitas sahabat mata ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah (1) perilaku politik penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kecamatan Mijen Kota Semarang (2) Sikap Politik Penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kecamatan Mijen Kota Semarang. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada rumah sahabat mata Jl. Taman Pinus II Blok D6 no. 35 Jatisari Asabri BSB Mijen Semarang. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui sikap politik penyandang disabilitas tuna netra komunitas sahabat mata Kota Semarang. 2) mengetahui perilaku politik penyandang disabilitas tuna netra komunitas sahabat mata Kota Semarang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anggota komunitas sahabat mata Kecamatan Mijen Kota Semarang, pendiri komunitas sahabat mata. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dokumen yang didapat dari komunitas sahabat mata Kecamatan Mijen Kota Semarang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan antara lain 1) reduksi data 2) penyajian data 3) menyusun hipotesa kerja/kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tuna netra pada komunitas sahabat mata memiliki sikap politik yang dipengaruhi oleh visi misi komunitas, dimana sikap politik paling menonjol adalah sikap politik mandiri. Sikap politik yang diambil dipengaruhi pula oleh status sosial, keluarga dan lingkungan pergaulan, Sikap politik penyandang disabilitas tuna netra pada sahabat mata turut mempengaruhi perilaku politik yang mereka ambil, dengan kemampuan sebagai faktor dominan dalam menentukan perilaku politik. Selanjutnya faktor kemampuan tersebut antara lain: kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kemampuan mengembangkan diri sehingga menimbulkan rasa percaya diri, dan kemampuan mengikuti IT seperti menggunakan komputer, internet dan menggunakan akun media sosial. Saran yang diberikan penulis adalah (1) pemerintah dalam membuat kebijakan melibatkan penyandang tuna netra sebagai subjek bukan hanya sebagai objek



(2) perlu adanya perhatian khusus oleh partai politik atau calon wakil rakyat kepada penyandang disabilitas (3) perlu adanya kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk melakukan sosialisasi politik kepada penyandang disabilitas.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PRAKATA</b> .....	vi
<b>SARI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Batasan Istilah .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR</b>	
A. Deskripsi Teoritis .....	14
B. Kajian Hasil-hasil Penelitian Relevan .....	41
C. Kerangka Berfikir .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Latar Penelitian .....	46
B. Fokus Penelitian .....	47
C. Sumber Data Penelitian .....	48
D. Alat dan Teknik Penelitian .....	50
E. Uji Validitas Data .....	52
F. Teknik Analisis Data .....	53
G. Prosedur Penelitian .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	57
1. Gambaran Umum Komunitas Sahabat Mata .....	57
2. Sikap Politik Komunitas Sahabat Mata .....	60
3. Perilaku Politik Komunitas Sahabat Mata .....	70
B. Pembahasan .....	74
1. Sikap Politik Komunitas Sahabat Mata .....	74
2. Perilaku Politik Komunitas Sahabat Mata .....	78
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	87
B. Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Teori Fishbein .....	22
Bagan 2.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku .....	24
Bagan 2.3 Penambahan pada model Fishbein .....	24
Bagan 2.4 Kerangka berfikir .....	45
Bagan 3.1 Triangulasi Sumber .....	53
Bagan 4.1 Teori Fishbein .....	81
Bagan 4.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi perilaku .....	82
Bagan 4.3 Penambahan pada model Fishbein .....	83



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Anggota sahabat mata melakukan siaran radio .....	59
Gambar 3.2 kegiatan pesantren ramadhan .....	62
Gambar 3.3 Sarasehan sahabat mata bersama teman-teman UNS .....	63
Gambar 3.4 Pelatihan Komputer Bicara .....	69



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyandang Cacat Berat.....	3
Tabel 1.2 Data Penyandang Disabilitas tahun 2008-2012 .....	4



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial
- Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 3 Data Informan
- Lampiran 4 Foto Dokumentasi
- Lampiran 5 Hasil Wawancara



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang tidak mungkin dapat hidup sendiri, dia adalah makhluk sosial, sehingga dalam mengatur kehidupannya manusia ini memerlukan manusia yang lainnya untuk saling bekerja sama dari mulai lingkup terkecil yaitu dalam lingkup keluarga sampai pada lingkup terbesar yaitu dalam sebuah negara. Pancasila, sila I “Ketuhanan yang Maha Esa” memberi arahan mengenai hubungan vertikal sedangkan Sila II,III,IV dan V “Kemanusiaan yang adil dan beradab” “Persatuan Indonesia” “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” memberi arahan mengenai hubungan horizontal. Manusia mempunyai hubungan dengan Tuhan sebagai wujud penghambaan sebagai makhluk yang dikenal dengan hubungan vertikal, sedangkan dalam hubungan horizontal manusia memerlukan manusia lain dalam pemenuhan kehidupannya (makhluk sosial). Sebagai makhluk sosial manusia tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, namun juga dengan sadar atau tanpa sadar telah melakukan kegiatan politik dalam kehidupan sehari-hari. Baik secara sendiri maupun secara kolektif. Tidak ada manusia yang tidak berpolitik, minimal melakukan politik pada dirinya sendiri.

Dalam bekerja sama manusia dituntut untuk jujur, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan satu sama lain, termasuk pula dalam memperoleh pekerjaan, menyuarakan pendapat ataupun dalam menentukan sikap. Tata laku pergaulan ini adalah yang ideal walaupun dalam kenyataannya karena kekhilafan dari manusia itu sendiri maka keadilan yang harusnya tercipta menjadi bias dan hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI mengatur tentang hak azasi manusia yang dimiliki oleh semua manusia tidak terkecuali penyandang disabilitas, hak azasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, hak ini bersifat universal dimiliki oleh setiap manusia tidak terkecuali kaum disabilitas. Hak-hak politik kaum disabilitas sama dengan hak-hak politik manusia lainnya, hak-hak politik ini diwujudkan pula dalam bentuk sikap politik dan perilaku politik.

Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas) pada tanggal 30



Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas (penjelasan Undang-undang nomor 19 tahun 2011).

Populasi penduduk di Jawa Tengah sebanyak 33.270.207 jiwa jumlah PMKS sebesar 5.016.701 jiwa/15,08% dari penduduk Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut: kemiskinan 4.468.621 (13,43 %), kecacatan 117.458 (0,53 %), keterlantaran 234.205 (0,70 %), ketunaan 55.889 (0,17 %), korban bencana 70.041 (0,21 %), korban TK dan PM 4.785 (0,01 %), dan Keterpencilan 5.702 (0,01 %) (*sumber pemuktahiran data dinas sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2014*).

Tabel 1.1 Data Penyandang disabilitas Berat

Kode	Provinsi	Fisik	Mental	Fisik dan mental	Jumlah
31	DKI Jakarta	79	2	402	748
32	Jawa Barat	812	14	1.208	2.035
33	Jawa Tengah	901	46	1.567	2.524
34	DI Yogyakarta	309	41	589	939
35	Jawa Timur	578	11	1178	1767

(Sumber: pusat data penyandang disabilitas berat tahun 2015 direktorat jenderal rehabilitasi sosial kementerian sosial Republik Indonesia).

Dari tabel rekapitulasi data penyandang disabilitas tahun 2015 menurut data Direktorat Jenderal Rehabilitas Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah mempunyai jumlah penyandang disabilitas yang lebih banyak dibandingkan dengan provinsi yang lain seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Jumlah penyandang disabilitas kota Semarang tahun 2012 sebanyak 3.557 orang. Penyandang cacat ini terdiri dari cacat tubuh sebanyak 862 orang, tunanetra sebanyak 806 orang, cacat mental sebanyak 667 orang dan cacat ganda sebanyak 528 orang berikut data jumlah penyandang disabilitas dari tahun 2008-2012.

Tabel 1.2 Data Penyandang disabilitas tahun 2008-2012

Tahun	Jenis Cacat					Jumlah
	Tubuh	Tunanetra	Mental	Tuna Rungu	Ganda	
2012	862	806	667	694	528	3.557
2011	758	390	980	526	94	2.748
2010	378	192	245	214	97	1.126
2009	612	349	422	309	81	1.773
2008	616	346	416	320	86	1.784

(Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2013).

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah penyandang cacat Kota Semarang semakin meningkat, dengan jumlah yang banyak ini sangat disayangkan apabila penyandang disabilitas tidak melakukan penghayatan terhadap suatu objek politik sehingga kurang mampu menentukan sikap dan perilaku politik yang hendak diambil.

Selain UU No 4/1997 yang mengatur mengenai penyandang cacat, pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan salah satu sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM.

Mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas dalam sebuah wawancara majalah swarahima Maulani A Rotinsulu ketua himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) mengungkapkan:

Bicara hak-hak politik, kita tidak bisa melihat hanya dari proses pemilunya saja. Akan tetapi juga menyangkut administrasi kependudukan seperti, apakah anak-anak administrasinya juga diurus oleh orang tua? Saat ke catatan sipil untuk mengurus administrasi, adakah sikap-sikap diskriminasinya? Misalnya, “Ah, anak-anak ini tidak berpotensi ke depan, sehingga tidak usah diurus surat-suratnya.” Lalu ketika dia dewasa dan harus punya KTP, dia jadi tidak punya KTP. Yang namanya KTP kelihatannya sepele, tetapi banyak teman-teman disabilitas yang tidak memiliki KTP. Jadi, kalau berbicara hak politik harus dimulai dari hak sipil mereka. Sebagai contoh, tahun 2009 di berbagai

panti tidak tersentuh oleh pendaftaran pemilihan sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk memilih.

(wawancara Maulani A Rotinsulu ketua himpunan wanita disabilitas Indonesia (HWDI) Disabilitas: *majalah swararahima Opini 1 Edisi 45 diunduh tanggal 27 januari 2016*).

Politik mempunyai cangkupan yang sangat kompleks dan luas, termasuk di dalamnya adalah disinggung pula mengenai sikap politik dan perilaku politik. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kartono (dalam Handoyo, 2010:6) Dalam bahasa percakapan sehari-hari, politik diinterpretasikan secara bervariasi, mulai dari pengertian positif misalnya kekuasaan, partai politik, pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, kehidupan parlementer sampai pada pengertian negatif “*gombal amoh*” hal yang tidak berguna, barang-barang kotor, perbuatan manipulatif, kelicikan, kemunafikan dan lain-lain. Berkaca dari pendapat Kartono maka manusia memandang politik dalam dua pilihan persepsi yaitu sebagai sesuatu yang negatif atau positif, cara pandang ini nantinya akan mempengaruhi bagaimana seseorang menentukan sikap politik dan perilaku politik yang akan diambil.

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Secara *etimology*, perilaku politik atau dalam bahasa Inggris disebut *politic Behavior* adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai individu politik. Seorang individu/kelompok

diwajibkan oleh negara guna melakukan perilaku politik. (Syah Putra,2012: 45).

Sedangkan Deliar Noer (dalam Handoyo,2010: 6) mengartikan politik sebagai studi yang memusatkan pada masalah-masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Maka dapat disimpulkan kiranya bahwa politik juga menuntut adanya sebuah interaksi baik antar individu, antar kelompok, ataupun kelompok dan individu atau sebaliknya. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat di antara lembaga-lembaga pemerintahan dan diantara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik, pada dasarnya merupakan perilaku politik (Surbakti,2010: 20). Berbicara mengenai interaksi maka interaksi-interaksi ini menimbulkan adanya sebuah sikap, Sikap bisa timbul dikarenakan adanya stimulus dan berkembang dalam basis sosial tertentu seperti ekonomi, agama termasuk pula dalam politik. Dalam politik kita mengenal adanya "sikap politik". Sikap politik sendiri dapat didefinisikan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap obyek tersebut, dengan munculnya sikap tersebut, maka dapat diperkirakan perilaku politik akan muncul juga.

Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena di samping perilaku politik ada perilaku yang lain seperti perilaku ekonomi, perilaku budaya, perilaku keagamaan dan lain sebagainya

(Sastroadmodjo,1995: 3) perilaku ini bisa dilakukan oleh individu ataupun secara kolektif oleh kelompok/masyarakat. Seseorang bisa dikatakan melakukan perilaku ekonomi sekaligus perilaku politik, begitu pula perilaku lainnya bisa pula disandingkan dengan perilaku politik, sehingga dikenal pula perilaku ekonomi politik, budaya politik, geo politik dan istilah-istilah lain yang menunjukkan bahwa politik tidaklah selalu berdiri sendiri. Tindakan-tindakan seperti protes, menyampaikan aspirasi, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah, melakukan demonstrasi, atau diam tidak melakukan apapun termasuk pula dalam sikap politik karena didalamnya terdapat penghayatan mengenai objek politik.

Dari pemaparan tersebut bahwasanya sikap dan perilaku politik ini bisa dilakukan oleh setiap orang baik secara individu maupun secara kolektif, termasuk dalam komunitas-komunitas tertentu, salah satunya terdapat pada penyandang disabilitas tunanetra komunitas sahabat mata di Kecamatan Mijen Kota Semarang. Komunitas ini selain bergerak dalam bidang sosial seperti pelatihan komputer khusus untuk tunanetra, pelatihan huruf *braile*, pelatihan siaran radio, pelatihan membaca Al Quran *braile* tidak jarang juga komunitas ini bekerja sama dengan pihak KPU untuk mengadakan sosialisasi pemilu melalui radio Sahabat Mata (SAMA), radio SAMA ini dikelola oleh teman-teman tunanetra dari komunitas sahabat mata.

Komunitas sahabat mata sering melakukan kegiatan dan bersinggungan dengan instansi lain sehingga tidak jarang kelegalan komunitas menjadi diperlukan, sehingga pada tahun 2008 komunitas ini meresmikan diri menjadi sebuah yayasan dengan nama yang tetap yaitu komunitas sahabat mata. Komunitas ini di pelopori oleh Basuki (44 th), Basuki (44 th) aktif sebagai relawan KPU pada pemilihan Gubernur dan pemilihan Walikota Semarang tahun 2015 kemarin. Berkaca dari hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa komunitas sahabat mata adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial pendidikan namun berperan juga dalam bidang politik yaitu dalam hal sosialisasi politik kepada masyarakat melalui radio SAMA umumnya dan kepada teman-teman tunanetra di Kota Semarang pada khususnya.

Bertolak dari uraian yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Sikap dan perilaku politik penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kecamatan Mijen Kota Semarang”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sikap politik penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kota Semarang?

2. Bagaimanakah perilaku politik penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kota Semarang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui sikap politik penyandang disabilitas tunanetra komunitas sahabat mata Kota Semarang.
2. Mengetahui perilaku politik penyandang disabilitas tunanetra komunitas sahabat mata Kota Semarang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat memperoleh dan menambah wawasan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, khususnya bagi peneliti dan mahasiswa jurusan politik dan kewarganegaraan tentang sikap politik dan perilaku politik penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi penulis



Menambah wawasan dan pengetahuan tentang sikap politik dan perilaku politik penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kota Semarang.

b. Manfaat bagi Fakultas Ilmu Sosial

Menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian sejenis.

c. Manfaat bagi penyandang disabilitas komunitas sahabat mata Kota Semarang.

Menambah pengetahuan teman-teman komunitas sahabat mata sehingga mampu menentukan sikap politik dan perilaku politik sebagai bagian dari warga negara yang baik.

## E. Batasan istilah

### 1. Sikap politik

Sikap politik yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah sikap politik penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kecamatan Mijen Kota Semarang. Bagaimana keyakinan yang melekat dalam diri penyandang disabilitas yang mendorong mereka untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan cara tertentu, bagaimana pula penghayatan mereka mengenai suatu objek politik.

### 2. Perilaku politik

Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam kegiatan politik (Surbakti, 1992: 131). dikemukakan pula bahwa

perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Secara *etimology*, perilaku politik atau dalam bahasa Inggris disebut *politic behavior* adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai individu politik (Syah Putra, 2012: 45). Perilaku politik yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah perilaku politik penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kecamatan Mijen Kota Semarang.

### 3. Penyandang disabilitas

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 disebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas yang nantinya menjadi informan dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata Kecamatan Mijen Kota Semarang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemilih. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang apabila hendak menjadi pemilih dalam peraturan komisi pemilihan umum antara lain:

- a. berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.
- b. terdaftar sebagai pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
- c. tidak sedang terganggu jiwanya, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 bulan.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi teoretis

##### 1. Sikap politik

Sikap adalah kesiapan merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi secara konsisten (Ahmadi,2009: 151). Gerungan (dalam Ahmadi 2009: 150-151) menyebutkan bahwa *attitude* dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap, pandangan atau sikap perasaan, tetapi sikap ini disertai oleh kecenderungan bertindak sesuai sikap terhadap tersebut tadi. Jadi *attitude* lebih diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan untuk bereaksi terhadap sesuatu hal.

Attitude dapat diterjemahkan sebagai sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan,tetapi sikap itu disertai olehkecenderungan bertindak sesuai denga sikap yang objek tadi itu, jadi attitude itu tepat diterjemahkan sebagai sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal, Attitude atau sikap senantiasa terarahkan terhadap suatu hal , suatu objek. Tidak ada attitude tanpa objeknya (Gerungan,149: 2000).

Pembagian sikap atas sosial dan individual sikap dapat pula dibedakan atas (Ahmadi,2009: 151):

- a. sikap positif:sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.
- b. sikap negatif:sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

Sikap tumbuh dan berkembang dalam basis sosial tertentu, misalnya ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Di dalam perkembangannya sikap banyak dipengaruhi oleh lingkungan, norma-norma atau group (Ahmadi 2009: 157). Deliar Noer (dalam Handoyo, 2010: 6) mengartikan politik sebagai studi yang memusatkan pada masalah–masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.

Sejak awal hingga perkembangan terakhir ada sekurang-kurangnya terdapat lima pandangan mengenai politik. *Pertama*, politik adalah usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan “kebaikan bersama”. *Kedua*, politik adalah segala hal yang terkait dengan “penyelenggaraan negara dan pemerintahan”. *Ketiga*, politik adalah sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk “mencari dan

mempertahankan kekuasaan” dalam masyarakat. *Keempat*, politik adalah sebagai kegiatan yang terkait dengan “perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum”. *Kelima*, politik adalah sebagai “konflik” dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Sitepu: 10).

Sitepu (2012: 11-15) menyebutkan bahwa politik dapat didefinisikan berdasarkan cara pandang yang berbeda-beda, beberapa cara pandang dalam kaitannya melihat politik diantaranya yaitu:

- a. cara pandang klasik, cara pandang ini beranggapan bahwa politik adalah suatu asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut “kebaikan bersama” seluruh anggota masyarakat.
- b. cara pandang kelembagaan, melihat politik sebagai suatu hal yang berkaitan erat dengan “penyelenggaraan negara dan pemerintahan”. Dalam hubungan ini negara dipandang sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu, negara dipandang sebagai sumber utama hak untuk menggunakan penggunaan fisik yang sah.
- c. cara pandang kekuasaan, bahwa politik adalah kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan sendiri menurut Surbakti (dalam Sitepu,2012: 12) adalah interaksi antara dua

pihak yaitu ada pihak yang mempengaruhi dan pihak yang dipengaruhi atau yang satu mempengaruhi dan yang lain menaati atau mematuhi. Kekuasaan juga diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menguasai atau mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan, khususnya dalam mempengaruhi perilaku orang.

d. cara pandang fungsionalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum.

e. cara pandang konflik

Menurut pandangan ini politik sebagai konflik, dimana politik adalah kegiatan untuk mempengaruhi proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum atau keputusan politik tidak lain adalah sebagai upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan nilai-nilai itu seringkali terjadi *friksi-friksi* atau perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan terjadinya pertentangan yang bersifat fisik di antara berbagai pihak.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat pula disebutkan bahwa sikap politik adalah sikap, pandangan, dan kesediaan bereaksi oleh seseorang terhadap objek sikap yang bersifat politik seperti pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan lain sebagainya.

Sosialisasi politik di kalangan anak–anak pun merupakan upaya untuk membentuk beberapa sikap politik yang penting (Maran,2001: 67) berkaca dari pendapat Maran maka sikap politik ini bisa dibentuk sejak masa kanak–kanak dan dipengaruhi oleh sosialisasi politik, dalam hal ini sosialisasi merupakan proses *pedagogis* (pendidikan). Sikap politik dilakukan oleh warga negara biasa sampai pemimpin negara seperti yang disebutkan bahwa Sukarno telah berhasil membentuk opini masyarakat dalam berbagai sikap politik yang diambilnya baik yang menyangkut kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri (Muhtadi,2008: 32).

Selain sosialisasi politik ternyata kelas sosial juga mempengaruhi pembentukan sikap politik seseorang seperti yang diungkapkan (Maran,2001: 145) kelas sosial tampaknya memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap–sikap terhadap pemerintah dan kebijakan–kebijakannya. Ada beberapa istilah dalam politik sebagai berikut (Maran,2001: 155):

- a. *Apatisme* politik, adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala–gejala umum atau khusus yang ada dalam masyarakatnya. Orang yang apatis adalah orang yang pasif yang mengandalkan perasaan dalam menghadapi permasalahan. Ia tak mampu melaksanakan tanggung



jawabnya baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan selalu merasa terancam.

- b. *Sinisme* politik, adalah sikap yang dimiliki orang yang menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga. Bagi orang-orang sinis bersikap pesimistis lebih realistis ketimbang optimistis. Orang-orang yang sinis beranggapan bahwa sikap politik merupakan urusan yang kotor, bahwa para politisi itu tidak dapat dipercaya, bahwa individu menjadi korban dari kelompok yang melakukan manipulasi, bahwa kekuasaan dijalankan oleh orang-orang yang tak tau malu.
- c. *Alienasi*, menurut Robert Lane (dalam Maran, 2001: 155) adalah perasaan keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. Orang-orang tipe ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya menguntungkan penguasa.
- d. *Aonomi* adalah perasaan kehilangan nilai dan arah hidup sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. Orang yang berperasaan demikian menganggap penguasa bersikap “tidak peduli” terhadap tujuan-tujuan hidupnya.

Sikap politik dapat dinyatakan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan

objek tersebut. Misalnya saja dalam menanggapi suatu objek politik dalam pemilihan umum golput (golongan putih) termasuk sikap politik, ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan termasuk sikap politik, termasuk pula pada kelompok diam terhadap suatu kebijakan dan tidak melakukan apa-apa.

Diam ini juga termasuk sikap politik. Berkaca dari pendapat Sastroadmodjo (1995: 5) diam bukan berarti tidak memiliki sikap politik, diam bisa berarti setuju, dapat berarti netral, dapat pula berarti menolak namun tidak berdaya untuk membuat pilihan lain. Karena dibalik sikap terdapat suatu pertimbangan dan perasaan-perasaan tertentu terhadap suatu objek yang ada di sekitarnya.

Membawa opini baru sejalan dengan sikap kebijakan boleh jadi diartikan sebagai konsisten terhadap pandangan normatif tentang peran yang tepat dari proses politik sedangkan keberpihakan adalah lebih bermasalah (Highton, 2011: 5). Berkaca dari pendapat Highton maka suatu opini yang dihadirkan di tengah masyarakat terhadap suatu kebijakan akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan sikap politik yang diambil, selanjutnya dalam jurnalnya yang berjudul *Updating Political Evaluations: Policy Attitudes, Partisanship, and Presidential Assessments* disampaikan pula bahwa Stokes (dalam Highton, 2011: 5) mengenai isu posisi yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, orang-orang akan berbeda

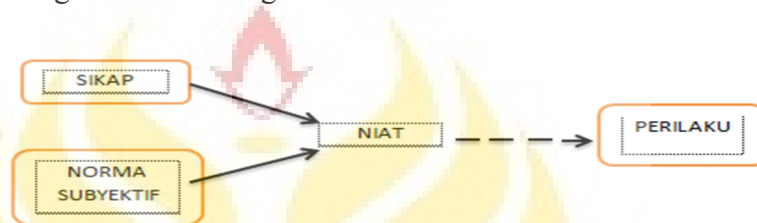
berkaitan dengan *preferensi* dan sikap mereka tentang isu-isu posisi. Sebagai contoh, pada isu-isu tentang kesejahteraan sosial, beberapa kaum liberal ekonomi, mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan menjamin setidaknya standar minimal hidup, dan lain-lain, sedangkan golongan konservatif ekonomi akan menyatakan keterlibatan pemerintah kurang dan lebih mengandalkan pasar bebas. Maka melihat pendapat Stokes bahwa sikap politik orang dipengaruhi pula oleh isu posisi yang sedang terjadi, terhadap suatu kebijakan yang mendukung posisi mereka maka kecenderungan untuk menyatakan sikap politik dalam bentuk dukungan akan terjadi, namun apabila kebijakan tersebut kurang menguntungkan posisi mereka maka tidak menutup kemungkinan sikap politik yang timbul adalah penolakan.

## 2. Perilaku politik

### a. Pengertian perilaku politik

Fishbein (dalam Zamroni,2010: 154) mengemukakan bahwa perilaku erat kaitannya dengan niat. Sedangkan niat akan ditentukan oleh sikap. Sikap dipandang merupakan faktor yang ikut menentukan perilaku (Zamroni,2010: 153), jadi menurutnya sikap tidak dapat menjelaskan secara langsung terhadap perilaku, disebutkan pula bahwa niat seseorang untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh dua hal sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri, yaitu sikap.
- 2) Sesuatu yang datang dari luar, yaitu persepsi dari orang lain terhadap dirinya dalam kaitannya dengan perilaku yang diperbincangkan. Dengan demikian teori Fishbein ini dapat digambarkan sebagai berikut:



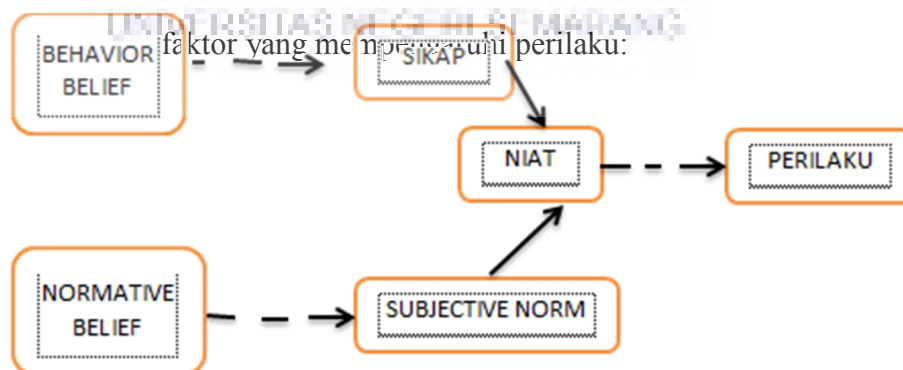
**Bagan 2.1** Teori Fishbein

Fishbein (dalam Zamroni,2010: 166) menyatakan bahwa tidak adanya hubungan antara sikap dan perilaku karena ukuran kurang spesifik. Sikap diukur dalam skope yang luas. Sedangkan perilaku diukur dalam skope yang sangat khusus. Oleh karenanya Fishbein menyarankan agar dalam mengukur perilaku digunakan banyak indikator. Pendekatan yang dilakukan oleh Fishbein dalam kaitannya dengan studi hubungan antara sikap dan perilaku memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan studi sikap dan perilaku yang terdahulu. Ciri-ciri tersebut antara lain (Zamroni,2010: 168):

- 1) teori Fishbein mengembangkan konsep sikap yang berbeda dengan konsep sikap yang sudah ada. Konsep sikap menurut Fishbein hanya mengandung afeksi tidak mengandung

*cognition, afeksi dan behavior*. Oleh karenanya, menurut Fishbein sikap adalah predisposisi seseorang untuk menyatakan setuju atau tidak setuju secara konsisten terhadap suatu masalah yang dihadapi.

- 2) teori ini mengukur sikap terhadap suatu perilaku, tidak mengukur sikap terhadap suatu objek.
- 3) Fishbein memasukkan unsur niat untuk melakukan sesuatu sebagai faktor yang paling tepat untuk memprediksi perilaku.
- 4) Fishbein memasukkan *behavior belief*, *normative belief*, dan *subjective norm*. *behavior belief* adalah pendapat seseorang tentang akibat melakukan perilaku tertentu dan penilaian terhadap akibat tersebut. Sedangkan *normative belief* dan *subjective norm* merupakan faktor luar yang mempengaruhi sikap seseorang. Faktor dari luar itu berupa hasil evaluasi yang bersangkutan terhadap pendapat orang lain tentang apa yang seharusnya ia lakukan. Berikut gambar model Fishbein tentang



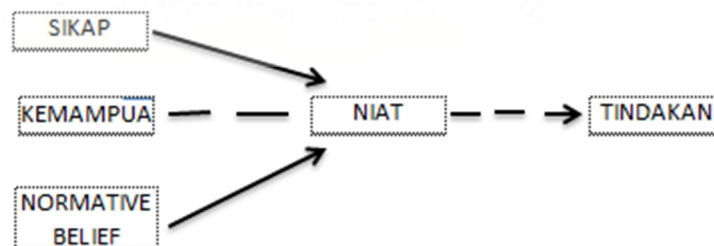
## Bagan 2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku

Beberapa penelitian yang mengkritik teori Fishbein (Zamroni,2010: 169), kritik tersebut antara lain:

- 1) ukuran *subjective norm* sangat lemah.
- 2) Fishbein tidak berhasil membedakan antara *normative belief* dan *behavior belief*.
- 3) *normative belief* merupakan variabel prediktor yang lebih baik dibandingkan dengan *subjective norm*.

Maka kritikan ini menyarankan bahwa adanya penambahan lain kedalam model fishbein antara lain (Zamroni,2010: 169):

- 1) kemampuan
- 2) konflik kepentingan
- 3) kesempatan
- 4) *confict motive*
- 5) *self concept*



## Bagan 2.3 Penambahan pada Teori Fishbein

Perilaku politik berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai suatu tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mencapai tujuan tersebut. Politik senantiasa berkenaan dengan tujuan masyarakat secara umum (*public goal*) dan bukan tujuan orang perorangan. Perilaku seseorang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari termasuk perilaku ekonomi, namun apabila pemerintah berupaya agar kebutuhan pokok rakyat dapat terpenuhi secara baik, dalam hal ini merupakan perilaku politik ekonomi (Sastroadmodjo,1995: 3).

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Secara *etimology*, perilaku politik atau dalam bahasa Inggris disebut *politic Behavior* adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai individu politik. Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara guna melakukan perilaku politik. Implementasi dari kegiatan perilaku politik dapat berupa hal-hal berikut (Syah Putra,2012: 45):

- 1) terlibat aktif dalam pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin, minimal sebagai pemilih;

- 2) mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat;
- 3) berperan serta dalam proses politik, semisal melakukan kritisi terhadap politikus yang berotoritas;
- 4) berhak untuk menjadi pimpinan politik;
- 5) Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.

Pembahasan perilaku politik diartikan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan politik ada yang dilakukan pemerintah ada yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan dan kegiatan politik yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan fungsi politik (Surbakti dalam Khoiro,2002: 31).

Carmines dan Huckfeldt (dalam PolGov,2014: 3) menyebutkan bahwa ada tiga pendekatan untuk melihat perilaku politik seseorang:

- 1) Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis disebut juga model perilaku memilih mazhab Colombi. Yang menjadi asumsi dari pendekatan ini yakni bahwa karakteristik sosiologis dan pengelompokan sosial seperti



umur, jenis kelamin, agama, kelas/status sosial, okupasi, latar belakang keluarga akan berpengaruh signifikan dalam pembentukan perilaku memilih. Pengelompokan sosial memiliki andil yang besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi individu. Dengan kata lain pendekatan ini mencoba memahami pengaruh proses yang terjadi di sisi luar kedirian seseorang (pemilih) terhadap sikap preferensi pemilihnya.

## 2) Pendekatan psikologis

Pendekatan ini dikembangkan di Amerika Serikat melalui *Survey Research Centre Michigan University* dan dipelopori oleh Agus Campbell. Sehingga pendekatan ini disebut juga sebagai mazhab *Michigan*. Model ini mencoba untuk menjawab kelemahan model pendekatan sosiologis yang sulit mengukur secara tepat indikator kelas sosial, tingkat pendidikan dan agama. Sehingga pendekatan ini mencoba menjelaskan aspek psikologis seseorang yang memberikan pengaruh kepadanya di dalam menentukan politik seseorang. Menurut pendekatan ini ada tiga hal yang mempengaruhi perilaku memilih yaitu:

- a) informasi politik yang diperoleh terkait dengan informasi kepentingan umum maupun kegiatan politik (seperti kampanye atau berita politik yang ada di media massa);
- b) ketertarikan terhadap politik, dan;
- c) identitas partai yang terkait dengan perasaan dekat, sikap mendukung, /setia atau identifikasi diri dengan partai politik tertentu.

Lebih jauh menurut J.Kristiadi (dalam PolGov,2014: 3) mengungkapkan bahwa pendekatan psikologis ini menempatkan pengaruh signifikan dari dalam diri pemilih yakni peta kognisi tentang realitas sosial politik (bagaimana pemilih memiliki gambaran mengenai dunia politik di sekitarnya). Peta kognisi ini meliputi: *Pertama*, persepsi yaitu berbagai informasi mengenai apa yang diterima seseorang akan mempengaruhi sebagian besar apa yang ingin mereka terima. *Kedua*, konseptualisasi yaitu bagaimana seseorang mengambil sebuah sinyal politik, bagaimana mereka menentukan rasa terhadap apa yang mereka terima. Dengan kata lain bagaimana mereka mengkonseptikan realitas politik. Aspek–aspek seperti perasaan, pengalaman dan interpretasi dari kejadian–kejadian politik juga secara signifikan mempengaruhi perilaku politik seseorang.

### 3) Pendekatan Ekonomis (Model *Rational Choice*).

Menurut Surbakti (2010: 34) Perbedaan pendekatan rasional dan pendekatan psikologis adalah bahwa perilaku pemilih yang rasional-responsif tidak permanen namun berubah-ubah seiring dengan bergulirnya waktu dan peristiwa politik, pada pendekatan ekonomi ini lebih mengarah kepada pertimbangan masyarakat mengenai untung-rugi.

Perilaku politik adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik adapun yang dimaksud melakukan politik contohnya adalah:

- 1) melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/pemimpin.
- 2) mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti ormas atau organisasi masyarakat atau LSM lembaga swadaya masyarakat.
- 3) ikut serta dalam peta politik.  
ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas.
- 4) berhak untuk menjadi pimpinan politik.

- 5) berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang–undang dasar dan peraturan hukum yang berlaku.

Surbakti (2010; 169) menyebutkan bahwa dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik dapat dipilih tiga kemungkinan unit analisis, yakni individu aktor politik, agregasi politik dan tipologi kepribadian politik sebagai berikut:

- 1) individu aktor politik meliputi aktor politik (pemimpin), Aktivistik politik, dan Individu warga negara biasa.
- 2) agregasi ialah individu aktor politik secara kolektif seperti kelompok kepentingan, birokrasi, partai politik, lembaga–lembaga pemerintahan, dan bangsa.
- 3) tipologi kepribadian politik yaitu tipe-tipe kepribadian pemimpin otoriter, *machiaveli* dan demokrat.

Disamping perilaku politik individu sebagai aktor politik Sastroadmojo dalam bukunya yang berjudul Perilaku Politik menyebutkan ada pula perilaku politik kelembagaan. Lembaga–lembaga ini dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) lembaga politik pemerintahan (suprastruktur politik).

Perilaku lembaga politik ini menyangkut perilaku parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan tugas

perundang-undangan, perilaku kabinet sebagai lembaga yang menyalurkan tugas pemerintahan, serta perilaku lembaga peradilan yang bertugas dalam lapangan penegakan hukum.

2) lembaga politik kemasyarakatan (infrastruktur politik).

Merupakan lembaga yang bersangkutan paut dengan pengelompokkan warga negara atau anggota masyarakat ke dalam berbagai macam golongan yang biasa disebut sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat meliputi partai politik, kelompok kepentingan (*interest groups*), kelompok-kelompok penekan (*pressure group*) serta media komunikasi politik.

Kemudain Surbakti membedakan antara perilaku politik dan partisipasi politik (Surbakti,2010: 180) disebutkan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut dan mempengaruhi hidupnya, yang melakukan kegiatan politik adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan dan warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan pemerintahan. Pemerintah yang memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan politik sedangkan masyarakat tidak memiliki kewenangan akan tetapi karena keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Kegiatan warga negara biasa ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. maka dengan kata lain menurut Surbakti (2010; 180) partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik tidak selalu berupa partisipasi politik.

**b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik**

Surbakti (2010; 168) menyebutkan bahwa tindakan dan keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan wewenang) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan, sedangkan fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat atau nilai-nilai politik. tetapi dipengaruhi juga oleh kepribadian (keinginan dan dorongan, persepsi dan motivasi, sikap dan orientasi, harapan dan cita-cita, ketakutan dan pengalaman masa lalu) individu yang membuat keputusan tersebut.

Selanjutnya disebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku aktor politik Surbakti (2010: 169) antara lain:

- 1) lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa.
- 2) lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung

seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan bernegara dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. Lingkungan langsung ini dipengaruhi oleh lingkungan tak langsung.

- 3) struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu untuk memahami struktur kepribadian, perlu dicatat bahwa terdapat tiga basis fungsional sikap, yaitu kepentingan, penyesuaian diri, eksternalisasi, dan pertahanan diri. Basis yang pertama merupakan sikap yang menjadi fungsi kepentingan, artinya penilaian seseorang terhadap suatu objek ditentukan oleh minat dan kebutuhan atas objek tersebut. Basis yang kedua merupakan sikap yang menjadi fungsi penyesuaian diri, artinya penilaian terhadap objek tersebut. Basis yang ketiga merupakan sikap yang menjadi fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Artinya penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi suatu konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri, seperti proyeksi, idealisme, rasionalisasi dan identifikasi dengan *agregator*.
- 4) faktor lingkungan sosial politik langsung berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan, seperti cuaca, keadaan ruang, kehadiran

orang lain, suasana kelompok dan ancaman dengan segala macam bentuknya. Aktor lingkungan politik tak langsung mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi. Selain itu juga mempengaruhi lingkungan sosial politik langsung berupa situasi. Faktor lingkungan politik langsung berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi akan mempengaruhi secara langsung salah satu dari kedua faktor yang mencakup struktur kepribadian atau sikapnya terhadap objek kegiatan itu, dan situasi ketika kegiatan itu hendak dilakukan. Hubungan kedua faktor ini terhadap perilaku akan bersifat *zero sum*: apabila faktor sikap yang menonjol. Faktor situasi kurang mengedepan, sebaliknya apabila situasi yang mengedepan, faktor sikap kurang menonjol.

Perilaku politik dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya masing-masing (Muhtadi,2008: 39). Komunikasi politik berkaitan dengan sosialisasi politik, cakupan sosialisasi politik juga berujung pada proses pembentukan perilaku, melalui sosialisasi politik masyarakat dapat belajar tentang politik sehingga mampu menentukan sikap terhadap lembaga-lembaga politik tertentu dan bahkan dimanifestasikannya dalam bentuk perilaku politik (Muhtadi,2008: 45). Berkaca dari pendapat Muhtadi maka perilaku politik ini ditentukan



pula oleh lingkungan masing-masing individu dan interaksi yang terjadi di dalam lingkungan tersebut.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa partisipasi politik merupakan salah satu wujud dari perilaku politik namun perilaku politik tidak mesti harus dengan partisipasi politik. Milbrath (dalam Sastroadmodjo, 1995: 15) menyebutkan empat faktor utama perilaku politik warga negara dalam bentuk partisipasi politik yaitu:

1) sejauh mana orang menerima perangsang politik

Kontak pribadi, organisasi dan media massa dapat memungkinkan seseorang untuk aktif dalam kegiatan politik, dengan mengikuti diskusi-diskusi politik, mengikuti informasi di media massa mengenai persoalan-persoalan politik memungkinkan individu terbuka terhadap pemecahan soal-soal tersebut. Seseorang yang memiliki formasi cukup lengkap terhadap permasalahan politik menyebabkan bertambahnya pengetahuan serta memunculkan rasa berkompeten terhadap permasalahan itu.

2) karakteristik pribadi seseorang

Kepribadian yang terbuka, sosiabel, *ektrovet* (lebih suka memikirkan orang lain) cenderung melakukan kegiatan yang politik dibandingkan kepribadian yang *introvet*. Dengan demikian faktor karakteristik pribadi seseorang berpengaruh terhadap perilaku politiknya. Maka Sastroadmodjo menyebutkan penjelasan

mengenai faktor-faktor tersebut dalam bukunya “Perilaku Politik” disebutkan bahwa:

- a) perbedaan jenis kelamin memiliki perbedaan dan karakteristik dan tingkah laku politik.
- b) usia mempengaruhi tingkat kematangan berpikir dan dalam mengambil keputusan.
- c) kelompok ras atau etnis memiliki watak kolektif yang berbeda, sehingga memberi warna perilaku politiknya.
- d) status sosial ekonomi memiliki pengaruh dalam membentuk pandangan serta dorongan ke arah perilaku politik seseorang.
- e) karakteristik sosial seseorang keadaan politik atau lingkungan politik tempat seseorang dapat menemukan dirinya sendiri.

### 3. Penyandang disabilitas

#### a. Hak politik penyandang disabilitas

Dalam pasal 13 UU nomor 8 tahun 2016, disebutkan hak politik penyandang disabilitas antara lain:

- 1) memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- 2) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- 3) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

- 4) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- 5) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- 6) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- 7) memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan memperoleh pendidikan politik.

Selanjutnya di dalam pasal 75 UU nomor 8 tahun 2016 disebutkan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan serta menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Penyandang disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur,

bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- 1) berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- 2) mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- 3) memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- 4) melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- 5) melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- 6) menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- 7) menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;

- 8) mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;

**b. Ragam penyandang disabilitas**

Ragam penyandang disabilitas dalam UU pasal 44 meliputi:

- 1) penyandang disabilitas fisik;
- 2) penyandang disabilitas intelektual;
- 3) penyandang disabilitas mental; dan/atau
- 4) penyandang disabilitas sensorik;

Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**4. Komunitas sahabat mata Kota Semarang**

Komunitas sahabat mata adalah lembaga yang dimotori oleh tunanetra muslim dan mulai beraktivitas secara nyata pada 1 mei 2008. Komunitas sahabat mata berasaskan Islam dan berdasarkan Al-quran dan As-sunnah, ingin menjadi lembaga yang bisa menginspirasi dan memotivasi pemanfaatan mata dengan *haq*, hingga mampu menjadi

salah satu solusi untuk mengobati penyakit hati sebagai modal dasar membangun insan kamil. Untuk mewujudkan visi di atas, komunitas sahabat mata berusaha memfokuskan kegiatannya pada:

- a. membangun kepedulian akan mata dan kesehatannya, hingga memunculkan satu amaliyah pemanfaatan mata sesuai dengan aturan yang *haq*.
- b. menggalang gerakan nyata mengurangi resiko kebutaan.
- c. menyediakan alat bantu aksesibilitas bagi tunanetra, hingga mereka mampu mengenali dan mengembangkan potensi dirinya guna membangun kemandirian.

Rumah sahabat mata sebagai pusat kegiatan komunitas sahabat mata, menyediakan perpustakaan braille, Al Quran *braille*, perpustakaan digital, komputer bicara untuk tunanetra yang terkoneksi dengan akses internet, studio mini untuk produksi buku digital, serta radio komunitas SAMA FM, sebagai pusat pelatihan untuk tunanetra, diantaranya:

- a. baca tulis Al Quran *Braille*, komputer bicara, kesenian, pijat, penyiar radio, kewirausahaan, pengembangan kepribadian, dan lain-lain.
- b. pendampingan terhadap tunanetra yang bersekolah di *sekolah inklusif*. Pendampingan dilakukan dalam bentuk pelatihan komputer bicara sebagai alat bantu bagi peserta didik,

menyediakan buku audio, menyediakan *reader* untuk membacakan buku-buku pelajaran maupun soal-soal ujian, memberikan konsultasi kepada guru untuk memecahkan permasalahan tunanetra sebagai peserta didik dalam proses belajar mengajar.

- c. pendampingan terhadap mereka yang baru diamanahi ketunanetraan, baik kepada yang bersangkutan maupun keluarganya.

SAMA FM 107.4 MHz adalah sebuah radio komunitas dengan penyiar dan operator studio radio semuanya adalah tunanetra. SAMA FM 107.7 MHz adalah stasiun radio pertama di Indonesia dengan penyiar dan operator studio radio para penyandang tunanetra. Sehingga tahun 2013 sahabat mata masuk dalam acara televisi '*Kick Andy Show*' pada tanggal 4 Januari tahun 2013.

## 1. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan

- a. Laporan riset peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berjudul "LITERASI POLITIK KAUM DIFABEL (Studi Kasus Pada Pemilih Tunanetra Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014)" tahun 2015 oleh Ahmad Sabiq dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi kemelekan politik para pemilih tunanetra di Kabupaten Banjarnegara dan faktor-faktor yang berpengaruh pada terbentuknya kemelekan

politik mereka pada Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas Tunanetra memiliki kemelekan politik yang beragam, sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kemelekan politik ini antara lain: latar belakang pendidikan, terlibat tidaknya dalam organisasi disabilitas, dan intensitas dalam mengakses beragam informasi.

- b. Skripsi dengan judul INTERAKSI SOSIAL PENYANDANG CACAT (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Interaksi Penyandang Cacat Tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 oleh Dwi Hastuti yang merupakan mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seperti umumnya manusia maka penyandang cacat juga melakukan komunikasi dan interaksi sosial, baik dengan sesama penyandang cacat maupun dengan orang di luar penyandang cacat, hambatan-hambatan yang muncul dalam interaksi sesama penyandang cacat umumnya lebih sedikit dibandingkan apabila interaksi ini terjadi dengan masyarakat luar, dalam penelitian ini juga ditemukan komunikasi personal persahabatan



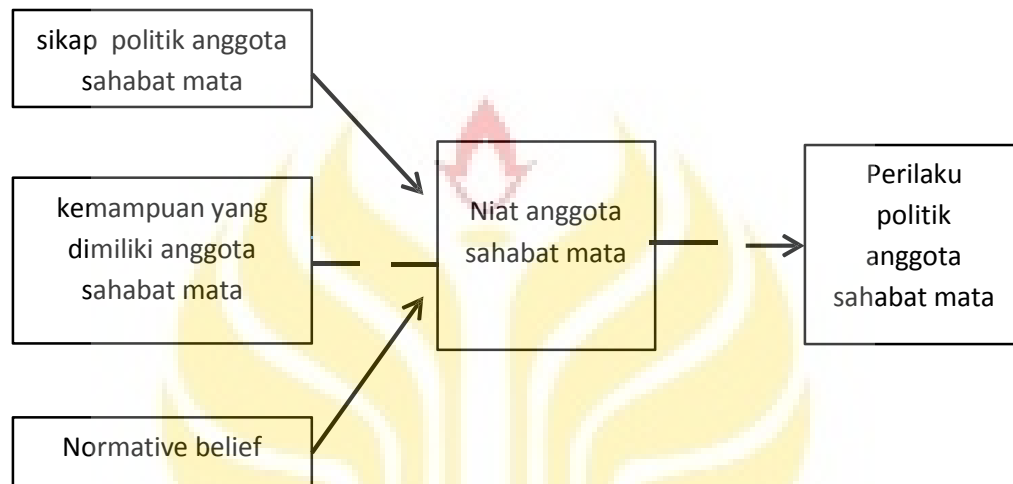
yang dibangun antar sesama penyandang cacat, maupun dengan orang di luar penyandang cacat, walaupun terkadang mereka bersifat tertutup dengan orang luar.

Dalam berinteraksi penyandang cacat di BBRSD ini terdapat pula konflik-konflik yang sulit untuk dihilangkan antara lain: salah persepsi, tidak saling tegur, menegur dengan sindiran, sampai konflik yang bersifat adu fisik. Dari beberapa penelitian tersebut di atas yang membedakan penelitian ini penulis akan menggali bagaimana sikap dan perilaku politik penyandang disabilitas tunanetra pada Komunitas sahabat mata kecamatan Mijen Kota Semarang yang mana dalam penelitian ini tentu saja penulis memperhatikan pula tingkat kemelekan politik penyandang disabilitas serta pola interaksi penyandang disabilitas untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

## B. Kerangka berpikir

Pancasila dan Undang–Undang Dasar RI mengatur tentang hak azasi manusia yang dimiliki oleh semua manusia tidak terkecuali penyandang disabilitas, penyandang disabilitas di Indonesia terhitung lumayan besar. HAM didalamnya termasuk mengenai hak–hak politik. hak ini dalam penggunaannya bisa dilihat salah satunya yaitu dari sikap dan perilaku politik yang timbul, manusia normal umumnya melakukan sikap dan perilaku politik misalnya saja dalam bentuk keyakinan mereka terhadap sesuatu objek politik atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan seperti menjadi pemilih, mengkritik aktor politik, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Sikap dan perilaku ini dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa manusia yang lain. Sikap politik timbul dari penghayatan terhadap suatu objek yang bersifat politik, sikap ini tidak selalu diperlihatkan dalam perilaku politik, sikap politik seseorang bisa saja sama dengan perilaku politiknya, atau berbeda dengan perilaku politiknya disebabkan oleh beberapa hal, perilaku politik ini tidak berdiri sendiri dan dipengaruhi banyak faktor, normatif belief merupakan faktor luar yang mempengaruhi sikap seseorang, dalam menentukan sikap dan perilaku politik anggota sahabat mata dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka, sedangkan niat merupakan faktor yang paling tepat untuk memprediksi perilaku. Faktor kemampuan apa saja yang mempengaruhi sikap dan perilaku politik anggota sahabat mata. Bagaimana sikap dan perilaku politik para penyandang disabilitas tunanetra pada

komunitas sahabat mata Kecamatan Mijen Kota Semarang dapat dilihat dengan berbagai cara, maka salah satunya adalah dengan melakukan penelitian. Dari uraian diatas kerangka berfikir penelitian ini digambarkan pada *bagan 2.4*.



**Bagan 2.4.** Kerangka Berfikir

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Sikap politik penyandang disabilitas tunanetra pada komunitas sahabat mata dipengaruhi oleh visi misi komunitas, sikap politik yang paling menonjol adalah sikap politik mandiri dimana anggota sahabat mata menggunakan hak pilih yang dimiliki secara mandiri tidak berdasarkan perintah orang lain, perilaku politik ditunjukkan pada kesediaan membantu KPU melakukan sosialisasi politik melalui radio SAMA berupa iklan mengenai pemilu yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih yang dimiliki. Selain visi misi komunitas sikap dan perilaku politik anggota sahabat mata dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan status sosial mereka. Perilaku politik yang ditunjukkan sejalan dengan sikap politik yang diambil.

Sikap politik mempengaruhi perilaku politik yang diambil, faktor “kemampuan” ditemukan sebagai faktor dominan dalam mempengaruhi perilaku politik penyandang tunanetra komunitas sahabat mata ditemukan sebagai berikut: kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, kemampuan mengembangkan diri sehingga menimbulkan rasa percaya diri, dan kemampuan mengikuti IT seperti menggunakan komputer, internet dan memiliki akun media sosial.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dengan melibatkan teman-teman penyandang disabilitas, sehingga teman-teman penyandang disabilitas tidak merasakan partisipasinya hanya sebagai objek namun juga sebagai subjek.
2. Perlu adanya perhatian khusus yang diberikan oleh partai politik atau calon wakil rakyat kepada para penyandang disabilitas mengingat setiap warga negara mempunyai hak pilih yang sama.
3. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama kaitannya dalam sosialisasi politik terhadap penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi, Abu. 2009. Psikologi Sosial. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Handoyo, Eko. 2010. Buku Ajar Pendidikan Politik Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Maran, Rafael R. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhibbin, 2012. Politik Kiai dan Politik Rakyat (Pembacaan Masyarakat terhadap Perilaku Politik Kiai). STAIN Jember Press.
- Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat. 2011. Buku Panduan Akses Pemilu (Jaminan partisipasi hak politik bagi penyandang disabilitas). Jakarta: Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat.
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syah Putra, Dedi K. 2012. Media dan Politik (Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis Mutualisme Media dan Politik). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ummatin, Khoiro. 2002. Perilaku Politik Kiai. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zamroni. Pengantar Pengembangan Teori Sosial. 1992. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.

### Jurnal, Skripsi.

- Ahmad Sabiq dkk. 2015. *LAPORAN RISET PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU LITERASI POLITIK KAUM DIFABEL (Studi Kasus Pada Pemilih Tunanetra Di Kabupaten Banjarnegara Dalam Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden 2014)*. Banjarnegara: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Hastuti, Dwi. 2010. INTERAKSI SOSIAL PENYANDANG CACAT (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Interaksi Penyandang Cacat Tubuh di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) "Prof. Dr. Soeharso"

Surakarta). Surakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret.

Highton, Benjamin. 2011. *Updating Political Evaluations: Policy Attitudes, Partisanship, and Presidential Assessments*. California: Department of Political Science, University of California.

Tim Peneliti *Research Center for Politics and Government*. 2014. Survei Perilaku Pemilih dan *Political Linkage*. Yogyakarta: Tim Peneliti Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada.

### **Undang-undang**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Undang-undang Negara Republik Indonesai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang disabilitas.

Undang-undang Nomor Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

### **Internet**

<http://simgakin.semarangkota.go.id/2015/website/web/pages/119>(Diunduh tanggal 3 maret 2016).

<http://docplayer.info/310025-Oleh-kepala-dinas-sosial-provinsi-jawa-tengah.html> (Diunduh tanggal 3 maret 2016).

<http://asodkb.org/data/rekap/g=disabilitas> (Diunduh tanggal 3 maret 2016).

		<p>e. Mas Kiswanto (anggota SAMA).</p> <p>f. Mas. Kartijo (anggota SAMA)</p> <p>g. Mas. Yoko (anggota SAMA)</p> <p>h. Mbak Fifi (anggota SAMA).</p>	<p>diusulkan ke pak Lurah ya ditanggapi diproses juga, 1 tahun baru jadi.</p> <p>turunkan harga sandang pangan, kaum miskin lebih diperhatikan.</p> <p>transparansi dana bantuan, kurang paham kalau di daerah</p> <p>lebih rinci lagi untuk mandata orang difabel dari setiap RT/RW, banyak orang difabel yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak.</p> <p>lebih memperhatikan yang seperti saya ini, teman-teman yang cacat.</p>
--	--	---	--